



Badan Standardisasi Nasional
National Standardization Agency of Indonesia



Standard for Sustainable Development and Better Life

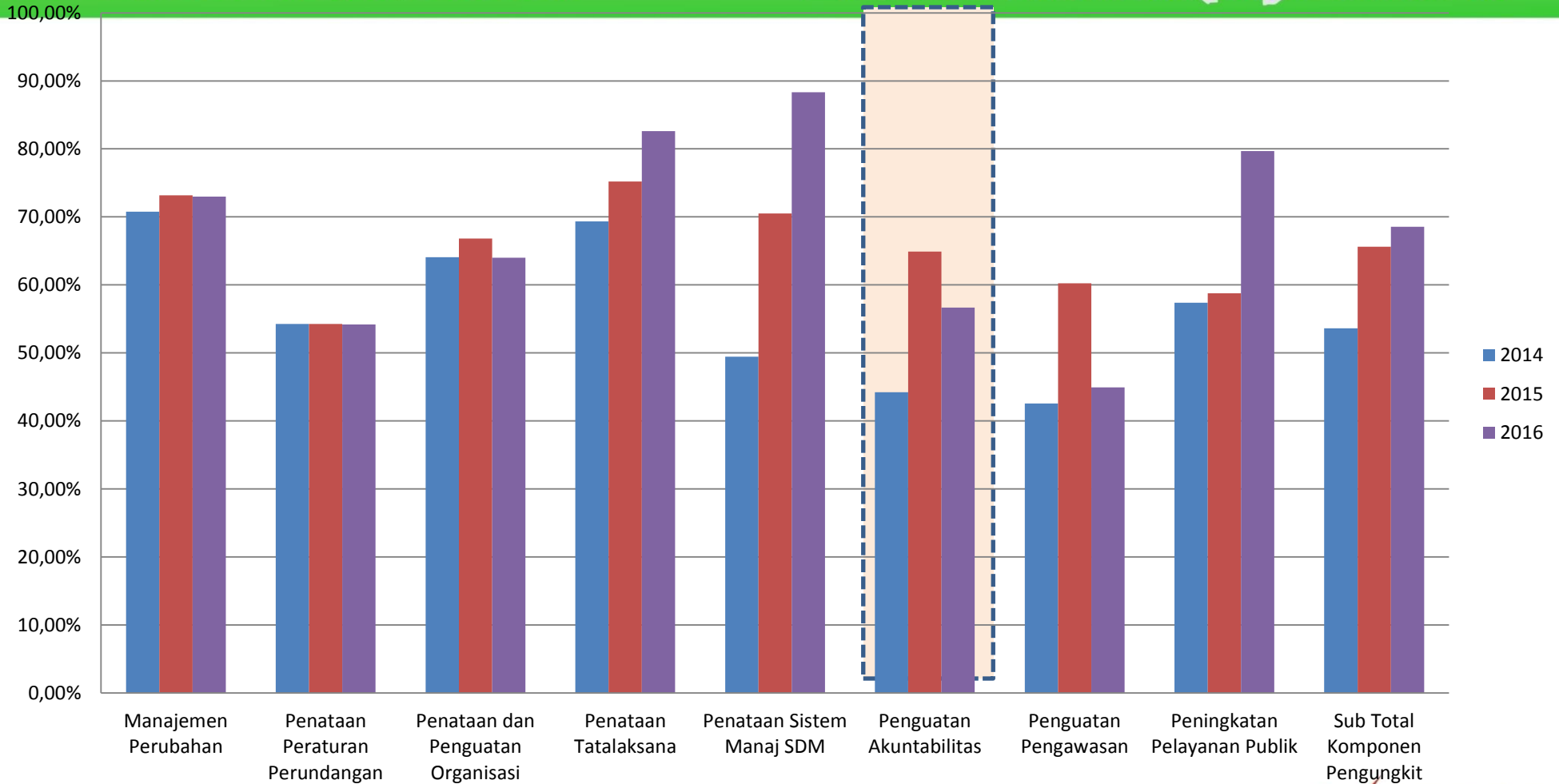
Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Jakarta, 8 September 2017



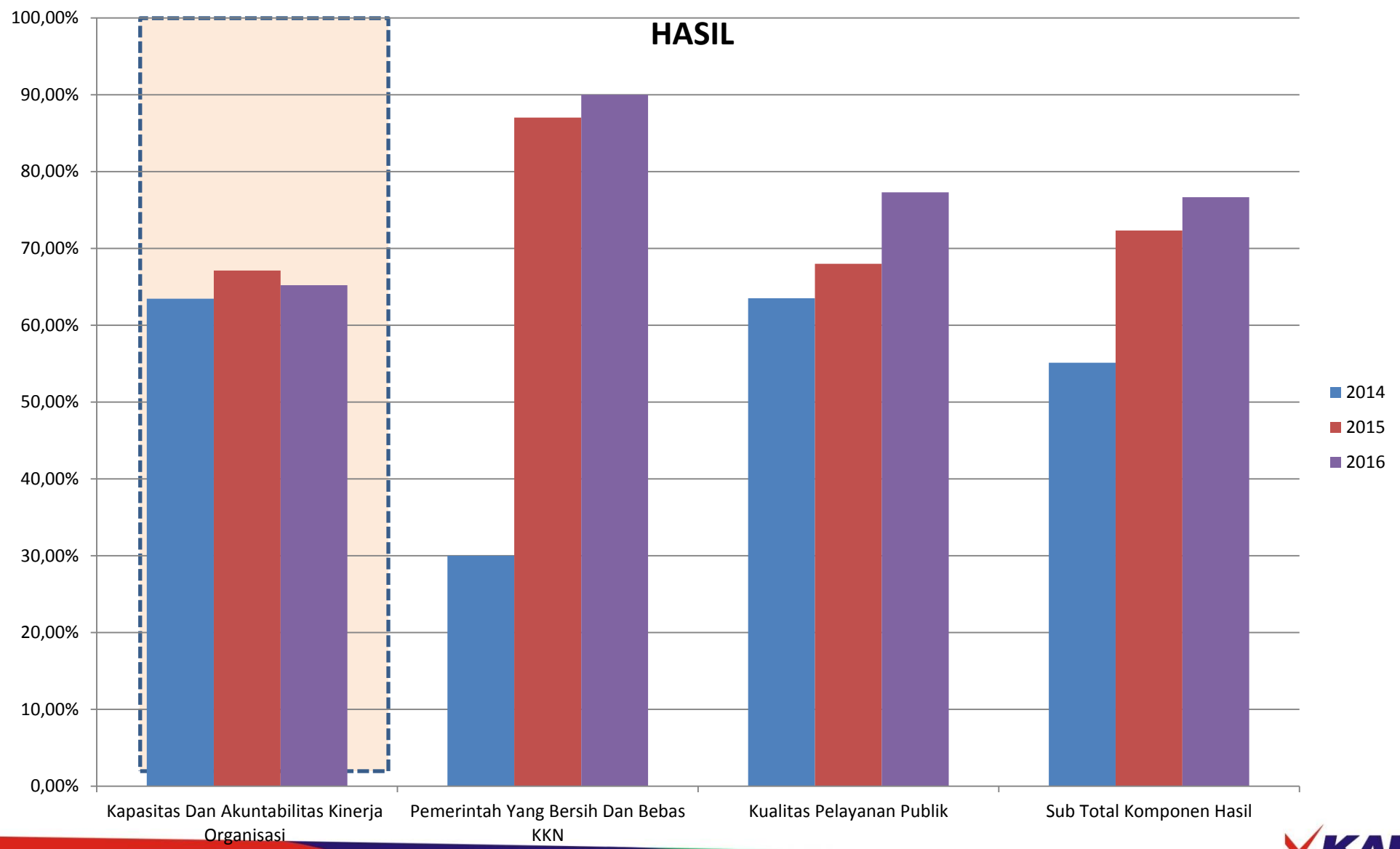
I. KOMPONEN PENGUNGKIT

Komponen Penilaian/Area Perubahan	Bobot	Nilai 2015	Nilai 2016 (Exit Meeting)	Nilai 2016
Manajemen Perubahan	5,00	3,66	4,23	3,65
Penataan perundangan	5,00	2,71	2,71	2,71
Penataan Organisasi	6,00	4,01	3,84	3,84
Penataan Tatalaksana	5,00	3,76	4,88	4,13
SDM	15,00	10,57	13,99	13,25
Penguatan Akuntabilitas	6,00	3,89	4,43	3,40
Penguatan Pengawasan	12,00	7,23	6,03	5,39
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,53	5,11	4,78
Total Komponen Pengungkit (A)	60,00	39,36	45,23	41,13



Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2015	Nilai 2016
Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,00	13,42	13,04
Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,70	9,00
Kualitas Pelayanan Publik	10,00	6,80	7,73
Total Komponen Hasil (B)	40,00	28,92	30,66
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100,00	68,29	71,79

Indeks RB BSN adalah 71,79 dengan kategori “BB”



LEMBAR KERJA EVALUASI REFORMASI BIROKRASI (INDEKS RB)

1 Keterlibatan pimpinan (2)		
a.	Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	<p>a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra</p> <p>b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra</p> <p>c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra</p> <p>d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra</p>
b.	Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	<p>a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja</p> <p>b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja</p> <p>c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja</p> <p>d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja</p>
c.	Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	<p>a. Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala</p> <p>b. Sebagian besar pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala</p> <p>c. Sebagian kecil pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala</p> <p>d. Seluruh pimpinan belum memantau pencapaian kinerja secara berkala</p>



LEMBAR KERJA EVALUASI REFORMASI BIROKRASI (INDEKS RB)

2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (4)	
	a. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja b. Sebagian besar unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja c. Sebagian kecil unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja d. Seluruh unit organisasi belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
	b. Apakah pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun	Ya, apabila terdapat dokumen pedoman akuntabilitas kinerja
	c. Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancang berbasis elektronik	<ul style="list-style-type: none"> a. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi dan terintegrasi b. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi tapi belum terintegrasi c. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik dalam pengembangan tp belum implementasi d. Belum ada Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik
	d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit	<ul style="list-style-type: none"> a. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit organisasi b. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi c. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi
	e. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran d. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara tahunan e. Pemutakhiran data kinerja belum dilakukan

Rencana Aksi PMPRB 2017

Penguatan Akuntabilitas Kinerja*

No	Kondisi	Rencana Aksi 2017	Unit P Jawab	Kode Area Perubahan
1	Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulan	Memastikan pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan	PKT	A.VI.2e

*) Sumber : Rencana Aksi PMPRB berdasarkan Nodin Inspektorat No 110/Inspektorat/05/2017

Hasil Evaluasi AKIP 2016

	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2015	2016
a	Perencanaan Kinerja	30	19,92	21,37
b	Pengukuran Kinerja	25	15,80	16,13
c	Pelaporan Kinerja	15	10,28	10,36
d	Evaluasi Internal	10	5,85	5,89
e	Capaian Kinerja	20	12,35	11,12
	Nilai Hasil Evaluasi	100	64,20	64,87
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Catatan :

1. Surat Menpan No B/589/M.AA.05/2017
2. Rekomendasi

Uraian Hasil Evaluasi

1. Sudah terdapat perbaikan yang dilakukan BSN dalam penerapan dan penguatan manajemen berbasis kinerja (SAKIP) baik di tingkat Badan maupun unit kerja
2. BSN telah menyusun dan menyempurnakan IKU meski belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan, penganggaran, pengukuran, Perjanjian Kinerja, dan pelaporan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kualitas pengukuran dan simpulan capaian kinerjanya

Uraian Hasil Evaluasi (2)

3. Terkait dengan baru disempurnakannya IKU , BSN belum melakukan penjenjangan (cascading down) kinerja utama, mulai dari tingkat Badan sampai ke tingkat eselon IV
4. Evaluasi yang dilakukan atas program, baru sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum menyimpulkan keberhasilan sebuah program

CATATAN : Berdasarkan hasil evaluasi, Menpan RB menyampaikan 8 rekomendasi

Rencana Aksi PMPRB 2017 *

Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

No	Kondisi	Rencana Aksi 2017	Unit P Jawab	Kode Area Perubahan
1	Nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) = 64,87	<ul style="list-style-type: none">• Memastikan seluruh unit eselon I dan II membuat LAKIP• Memastikan tercapainya IKU sesuai target• Memastikan seluruh unit kerja eselon I dan II membuat Renstra	PKT	B.I.1

*) Sumber : Rencana Aksi PMPRB berdasarkan Nodin Inspektorat No 110/Inspektorat/05/2017

Rencana Aksi berdasarkan Rekomendasi Menpan RB

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Waktu
1	Melakukan reviu atas Renstra dan dokumen perencanaan lain (baik untuk tingkat Badan maupun Unit Kerja) agar lebih memperhatikan dan selaras dengan Indikator Kinerja Utama yang telah disempurnakan	- Reviu IKU/Renstra (pembahasan dan perbaikan dokumen IKU/Renstra)	Seluruh Unit Kerja, koordinasi oleh Biro PKT	Agt - Sep 2017
2	Memastikan dimanfaatkannya IKU pada proses (dalam dokumen) perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal	- Penelitian RKAKL (memastikan di dalam TOR telah diidentifikasi keterkaitan dengan IKU)	Biro PKT	Mei-Okt 2017

Rencana Aksi berdasarkan Rekomendasi Menpan RB

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Waktu
3	<p>Mendorong diterapkannya anggaran berbasis kinerja, dengan cara memastikan dan meminta seluruh unit kerja merencanakan dan mempertanggungjawabkan kinerja utama atau hasilnya terlebih dahulu (termasuk janji atau outcome yang belum terwujud) sebelum mengajukan anggaran.</p> <p>Memastikan seluruh unit kerja dapat mengaitkan kinerja utama (Indikator dan Target) dengan penanggarannya (mengaitkan IKU dengan anggarannya)</p>	- Membuat kontestasi anggaran (TOR dan RAB)	Biro PKT	Okt 2017
4	<p>Memastikan tersedianya <u>Perjanjian Kinerja</u> atau kesepakatan kinerja, yang menjanjikan, dan menjanjikan kinerja utama atau hasil (bukan sekedar kerja) yang sangat terukur, relevan, dan dapat ditagih serta menggambarkan kekhasan, keunikan, keutamaan dan alasan keberadaan entitas, mulai dari tingkat Kepala Badan, eselon I, II III dan IV, bahkan jika perlu sampai kepada tingkatan paling rendah yang paling mungkin</p>	- Membuat Perjanjian Kinerja sd level Ess IV	Seluruh Unit Kerja, koordinasi oleh Biro PKT	Maret 2017

Rencana Aksi berdasarkan Rekomendasi Menpan RB

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Waktu
5	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja pada butir 4), sebagai dasar pemberian reward and punishment sehingga dapat menumbuhkan budaya kinerja organisasi yang baik dan berbasis merit system	- Menyiapkan kriteria dalam menentukan reward dan punishment	Biro PKT	Sep 2017
6	Memastikan terwujudnya akuntabilitas kinerja internal melalui evaluasi yang berkualitas, dengan meningkatkan kompetensi APIP dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dan dapat memberikan rekomendasi perbaikan manajemen kinerja secara memadai dan berkelanjutan	- Pelaksanaan Audit Kinerja	Inspektorat	Sep 2017

Rencana Aksi berdasarkan Rekomendasi Menpan RB

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Waktu
7	<p>Agar setiap penanggungjawab program melakukan evaluasi program dalam rangka memastikan tersedianya <u>jawaban terukur</u> atas keberhasilan program - program prioritas atau unggulan yang ada di Badan Standardisasi Nasional.</p> <p>Penanggungjawab program harus memastikan keberhasilan maupun kurangberhasilan suatu program secara nyata dan terukur, perubahan kondisi yang terjadi atau perubahan yang terjadi pada suatu target grup (kelompok) tertentu yang menjadi target perubahan</p>	- Melakukan evaluasi program di akhir tahun	Biro PKT	Des 2017
8	Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dengan menginformasikan analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya	- Unit Kerja melakukan analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya sebagai masukan untuk penyusunan Laporan Kinerja BSN Th 2017	Seluruh Unit Kerja, koordinasi oleh Biro PKT	Jan 2018



TERIMA KASIH THANK YOU



BADAN STANDARDISASI NASIONAL



Members of



Members of



www.bsn.go.id

www.kan.or.id